

MENGUNCI SINERGITAS KPH DAN DESA: ANALISIS DAMPAKNYA DALAM MEMUSNAHKAN BUDAYA PERAMBAHAN HUTAN

Budi Utomo

budi.ybub@gmail.com

BKPH Ampang Plampang

ABSTRAK

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan di wilayah Balai KPH Ampang Plampang menyebabkan kurangnya arahan dalam pengelolaan kawasan hutan yang ditangani oleh warga sekitar. Salah satu akibat yang paling memprihatinkan adalah sikap, keyakinan, dan praktik masyarakat sebagai pengelola kawasan hutan yang cenderung mengutamakan panen palawija seperti jagung. Oleh sebab itu, perlu adanya kolaborasi antara Balai KPH Ampang Plampang dan Pemerintah Desa Banda untuk bersinergi dalam mengubah sikap dan pola pikir masyarakat Desa Banda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari sinergi inovasi antara BKPH Ampang Plampang dan Pemerintah Desa Banda untuk menghapus budaya perambahan hutan di Desa Banda. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan ditujukan untuk memeriksa objek yang bersifat alami, berlawanan dengan eksperimen, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu kombinasi dari berbagai sumber. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan, memperlihatkan, menjelaskan, serta memberikan jawaban yang lebih mendetail mengenai masalah yang diteliti melalui pemahaman mendalam terhadap individu, kelompok, atau peristiwa tertentu. Hasil penelitian dituliskan dalam bentuk kata-kata atau pernyataan yang mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Proses analisis kualitatif melibatkan informasi dari Pemerintah Desa Banda, masyarakat, dan anggota KWTH Banda Sejahtera. Dengan pendekatan deskriptif ini, diperoleh kata-kata tertulis atau verbal dan pengamatan perilaku terkait inovasi sinergi, penebangan hutan, pengembangan hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan, serta upaya pelestarian kawasan hutan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah penyebab deforestasi, cara-cara untuk mengatasi permasalahan, serta efek kerjasama antara KPH dan Desa. Penyebab terjadinya deforestasi di Desa Banda yang terletak di Kecamatan Tarano adalah: 1) faktor sosial dan ekonomi; 2) faktor akses terhadap hutan; 3) faktor budaya; 4) faktor kurangnya pendidikan masyarakat; 5) faktor keterbatasan personil dalam pengawasan hutan. Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Faktor yang lebih mendorong terjadinya perambahan hutan yaitu faktor sosial dan ekonomi. Upaya untuk mengatasi masalah perambahan hutan dilakukan dengan memperhatikan kelima aspek yang telah disebutkan. Untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini, BKPH Ampang Plampang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Banda. Beberapa hasil positif dari kolaborasi ini antara lain: 1) intensitas kerja sama yang semakin solid setelah Dana Desa dialokasikan untuk mendukung fungsi KPH sejak 2022; 2) perubahan cara pikir, perilaku, dan budaya masyarakat yang mulai menjauh dari tradisi merambah hutan; 3) terealisasinya Wisata Desa KARAJA dan peningkatan produktivitas KWTH Banda Sejahtera yang berkontribusi pada pengurangan ketergantungan terhadap hutan di hilir; 4) kesejahteraan warga yang mengalami peningkatan; 5) lahirnya inovasi lain seperti pengembangan minyak kayu putih.

Kata Kunci: Inovasi, Mitigasi Perubahan Iklim, Perambahan Hutan, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Sinergitas.

ABSTRACT

Lack of knowledge and understanding of the community about the importance of forest conservation in BKPH Ampang Plampang area has resulted in a lack of direction in the management of forest areas handled by local residents. One of the most concerning consequences is the attitude, beliefs, and practices of the community as forest area managers who tend to prioritize the harvest of secondary crops such as corn. Therefore, there needs to be collaboration between BKPH Ampang Plampang and the Banda Village Government to synergize in changing the attitudes and mindsets of the Banda Village community. This study aims to analyze the influence of innovation synergy between BKPH Ampang Plampang and the Banda Village Government to eliminate the culture of forest encroachment in Banda Village. The method applied in this study is a descriptive qualitative approach. Descriptive qualitative research is based on the philosophy of postpositivism and is intended to examine natural objects, as opposed to experiments, where researchers act as the main instrument. Data collection was carried out using triangulation techniques, namely a combination of various sources. The purpose of qualitative descriptive research is to describe, show, explain, and provide more detailed answers to the problems studied through an in-depth understanding of certain individuals, groups, or events. The results of the study are written in the form of words or statements that reflect the actual conditions. The qualitative analysis process involves information from the Banda Village Government, the community, and members of KWTB Banda Sejahtera. With this descriptive approach, written or verbal words and observations of behavior related to synergy innovation, deforestation, sustainable development of non-timber forest products, and efforts to preserve forest areas are obtained. Based on the research results, there are a number of causes of deforestation, ways to overcome the problems, and the effects of cooperation between the KPH and the Village. The causes of deforestation in Banda Village, located in Tarano District, are: 1) social and economic factors; 2) factors of access to forests; 3) cultural factors; 4) factors of lack of community education; 5) factors of limited personnel in forest supervision. Of the five factors, they are interrelated. The factors that drive forest encroachment are social and economic factors. Efforts to overcome the problem of forest encroachment are carried out by considering the five aspects that have been mentioned. To ensure the success of this initiative, BKPH Ampang Plampang is working with the Banda Village Government. Some positive results from this collaboration include: 1) the intensity of cooperation is increasingly solid after Village Funds were allocated to support the function of the KPH since 2022; 2) changes in the mindset, behavior, and culture of the community who are starting to move away from the tradition of encroaching on forests; 3) the realization of KARAJA Village Tourism and increased productivity of KWTB Banda Sejahtera which contributes to reducing dependence on forests downstream; 4) the welfare of citizens has increased; 5) the birth of other innovations such as the development of eucalyptus oil.

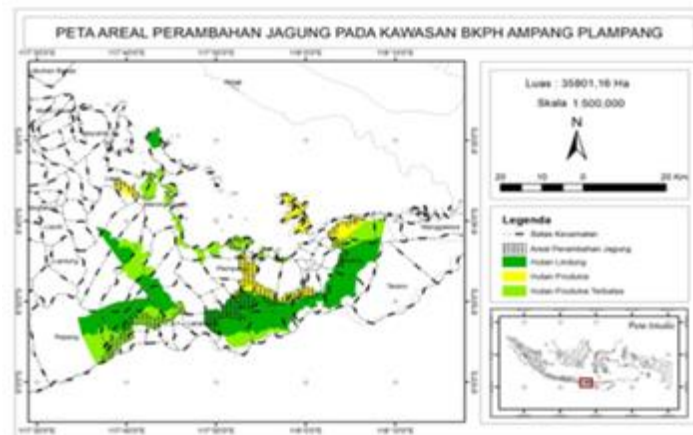
Keywords: *Climate Change Mitigation, Forest Encroachment, Innovation, Sustainable Forest Management, Synergy.*

PENDAHULUAN

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan di wilayah Balai KPH Ampang Plampang menyebabkan kurangnya arahan dalam pengelolaan kawasan hutan yang ditangani oleh warga sekitar. Salah satu akibat yang paling memprihatinkan adalah sikap, keyakinan, dan praktik masyarakat sebagai pengelola kawasan hutan yang cenderung mengutamakan panen palawija seperti jagung.

Praktik budidaya jagung saat ini sering kali mengandalkan teknik langsung. Ini termasuk membersihkan lahan pertanian, membakar lahan, dan menebang pohon atau tumbuhan. Metode ini dilakukan setiap tahun, yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan seperti banjir dan erosi tanah, serta peningkatan lahan terdegradasi. Meskipun demikian, petani percaya bahwa jagung memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian rumah tangga mereka. Selain itu, ada dorongan untuk meningkatkan

produksi jagung guna memenuhi tujuan nasional.



Gambar 1.

Pada tahun 2024, dilaporkan lahan terbuka di dalam Kantor KPH Ampang Plampang akibat perambahan hutan seluas 35.801,16 Ha (48,92%) dari total wilayah kerja seluas 73.183,95 Ha. Desa Banda menjadi salah satu penyumbang situasi ini. Kawasan yang telah dibuka untuk perambahan hutan di Desa Banda meliputi zona Kunil - Banda seluas 530,90 Ha dan zona Banda - Ongko seluas 358,16 Ha sehingga totalnya menjadi 889,06 Ha (2,48%). Perambahan hutan mengacu pada kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki, menguasai, dan mengeksploitasi sumber daya hutan tanpa memperhatikan tujuan utama kawasan hutan (Raharja, dkk. 2018).

Tanah yang digunakan untuk menanam jagung mencakup Wilayah Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) dan mengakibatkan kerusakan pada area yang ditanami Jambu Mete, Gadung, serta vegetasi campuran lainnya. Sementara itu, Jambu Mete dan Gadung adalah komoditas yang bisa diberdayakan menjadi produk olahan yang lebih berkualitas. Di sisi lain, hutan campuran seharusnya berfungsi untuk melindungi keberlanjutan hutan dan mencegah terjadinya banjir, longsor, dan erosi tanah. Sebaliknya, lahan-lahan yang terbuka ini perlu direhabilitasi menjadi lahan yang produktif dengan cara pengelolaan yang ramah terhadap lingkungan melalui sistem agroforestry. Karena pada dasarnya, penerapan agroforestry memerlukan pendekatan yang berkelanjutan agar tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga pada pelestarian fungsi-fungsi ekologis hutan serta upaya mitigasi terhadap perubahan iklim. Menurut Fazriyas dan rekan-rekannya (2018), penyebab utama dari penggundulan hutan mencakup aspek akses terhadap kawasan hutan, transaksi lahan, hukuman legal, dan izin yang dikeluarkan oleh perangkat daerah. Selain itu, menurut Dhaka dan tim (2017), faktor yang memicu perambahan hutan juga meliputi keadaan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, kesuburan tanah yang tinggi di area tersebut, pengaruh dari sponsor, keterbatasan jumlah petugas pengawasan hutan, serta pelaksanaan hukuman, yang mendorong komunitas yang tinggal dekat lahan untuk memasuki kawasan dan membuka lahan serta merambah hutan.

Berdasarkan poin tersebut, perlu adanya kolaborasi antara Balai KPH Ampang Plampang dan Pemerintah Desa Banda untuk bersinergi dalam mengubah sikap dan pola pikir masyarakat Desa Banda. Sikap dan pola pikir yang diinginkan adalah untuk menghentikan kegiatan perambahan hutan, serta turut serta dalam melestarikan hutan dan mengembangkan HHBK dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jovi (2022) menyebutkan bahwa syarat fundamental untuk menciptakan sistem sinergi yang ideal meliputi elemen seperti komunikasi yang lancar, respons yang cepat, kepercayaan, serta inovasi atau daya kreasi. Berdasarkan hal itu, sinergi antara KPH dan

desa ini ditujukan kepada kelompok yang terdampak oleh permasalahan tersebut, yaitu masyarakat Desa Banda dan KWTH Banda Sejahtera yang telah mendapatkan izin Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Untuk masyarakat secara keseluruhan, pendekatan ini diarahkan untuk menghapus budaya perambahan hutan dan mengembangkan Wisata Desa KARAJA, sementara bagi anggota KWTH Banda Sejahtera yang memiliki komoditas jambu mete dan gadung, mereka perlu mengolah hasil tersebut melalui komitmen inovasi sinergi antara KPH, Pemerintah Desa Banda, serta masyarakat atau kelompok.

Target dari inovasi kolaborasi ini meliputi beberapa hal berikut: 1) mengembangkan komitmen Pemerintah Desa Banda untuk terlibat dalam pelestarian hutan; 2) mengubah cara pandang dan sikap serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan; 3) membangun Destinasi Wisata Desa KARAJA (Kelengkeng, Rambutan, dan Jambu) di Desa Banda dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Hilir; dan 4) memperkuat organisasi kelompok serta mendirikan industri pengolahan HHBK di Hilir agar masyarakat tidak tergantung pada hasil hutan di daerah hulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari sinergi inovasi antara BKPH Ampang Plampang dan Pemerintah Desa Banda untuk menghapus budaya perambahan hutan di Desa Banda.

METODE PENELITIAN

Lokasi dari studi ini dilakukan di Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, yang berada dalam area kerja Balai KPH Ampang Plampang. BKPH Ampang Plampang adalah unit pelaksana teknis di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 10 Maret hingga 9 April 2025.

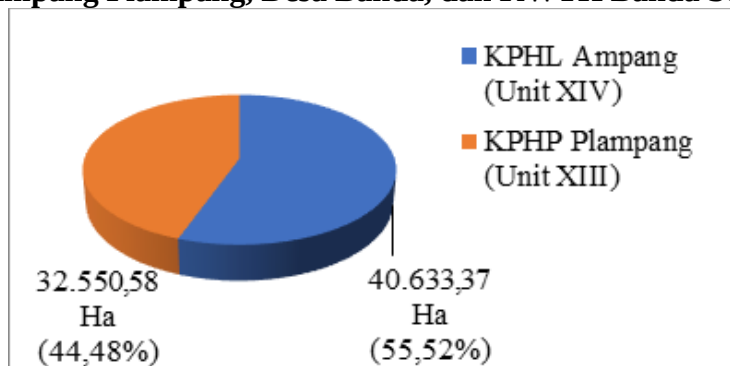
Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan ditujukan untuk memeriksa objek yang bersifat alami, berlawanan dengan eksperimen, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu kombinasi dari berbagai sumber. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan, memperlihatkan, menjelaskan, serta memberikan jawaban yang lebih mendetail mengenai masalah yang diteliti melalui pemahaman mendalam terhadap individu, kelompok, atau peristiwa tertentu. Hasil penelitian dituliskan dalam bentuk kata-kata atau pernyataan yang mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Proses analisis kualitatif melibatkan informasi dari Pemerintah Desa Banda, masyarakat, dan anggota KWTH Banda Sejahtera. Dengan pendekatan deskriptif ini, diperoleh kata-kata tertulis atau verbal dan pengamatan perilaku terkait inovasi sinergi, penebangan hutan, pengembangan hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan, serta upaya pelestarian kawasan hutan.

Berdasarkan sumbernya, informasi dibedakan menjadi dua kategori yaitu informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer mencakup data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan responden, seperti Kepala Desa Banda, anggota KWTH Banda Sejahtera, serta masyarakat umum. Aspek-aspek dalam data primer meliputi identifikasi responden, faktor-faktor yang memicu kerusakan hutan, implementasi kerjasama untuk mengatasi kerusakan hutan, dan efek yang dihasilkan dari kerjasama tersebut. Sementara itu, informasi sekunder berasal dari berbagai laporan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah di Desa Banda dalam bentuk Dokumen Dana Desa, jurnal, dan sejumlah literatur yang relevan dengan studi ini. Teknik dokumentasi

digunakan untuk mengumpulkan informasi sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil BKPH Ampang Plampang, Desa Banda, dan KWTH Banda Sejahtera



Gambar 2.

Balai KPH Ampang Plampang adalah KPH yang berada di pulau Sumbawa yang terdiri dari 2 Unit KPH yaitu KPHL Ampang dan KPHP Plampang. Berdasarkan rekonstruksi penataan batas yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Denpasar, Balai KPH Ampang Plampang memiliki total luasan wilayah kelola sebesar 73.183,95 Ha yang terbagi atas KPHL Ampang dengan luas 40.633,37 Ha dan KPHP Plampang dengan luas 32.550,58 Ha. Visi KPHL Ampang dalam RPHJP tahun 2025 s/d 2034 yang didasarkan pada visi pemerintah Kabupaten Sumbawa serta posisi organisasi yang strategis mengingat konfigurasi geografis Kabupaten Sumbawa: “KPHL Ampang menjadi Akselerator Pembangunan Wilayah Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Emparano melalui Pengelolaan Hutan Lestari dan Mandiri dengan Skema Kemitraan”. KPHP Plampang (Unit XIII) Balai KPH Ampang Plampang berdasarkan konfigurasi tata ruang Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB maka Visi KPHP Plampang (Unit XIII) Balai KPH Ampang Plampang dalam RPHJP Periode Tahun 2019-2028 yang ditetapkan adalah: “Terwujudnya KPHP Plampang (Unit XIII) Balai KPH Ampang Plampang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa yang Mandiri secara Berkelanjutan dan Kolaboratif untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Berdasarkan Kecamatan Tarano Dalam Angka 2024, Desa Banda terletak di Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Desa ini memiliki 4 dusun, 5 Rukun Warga (RW), dan 17 Rukun Tetangga (RT). Total populasi di Desa Banda mencapai 1.735 jiwa, terdiri dari 856 jiwa laki-laki dan 879 jiwa perempuan. Penduduk Desa Banda umumnya bekerja sebagai petani, dengan luas lahan pertanian padi mencapai 214 Ha, tadah hujan 28 Ha, kebun 263,94 Ha, Hutan Rakyat seluas 61 Ha, dan Hutan Negara seluas 657 Ha. Selain bertani, masyarakat juga berternak, termasuk sapi, kerbau, kuda, kambing, dan berbagai jenis unggas. Infrastruktur jalan yang tersedia adalah jalan darat beraspal dan jalan untuk usaha tani. Tujuan serta misi untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi termasuk pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan wisata desa KARAJA, dan industrialisasi hilir, serta lainnya.

KWTH (Kelompok Wanita Tani Hutan) Banda Sejahtera berlokasi di Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Ini adalah satu-satunya kelompok wanita yang ada dalam area kerja Balai KPH Ampang Plampang, yang mengelola area hutan dan memanfaatkan hasil hutan dengan cara yang legal. Izin resmi bagi kelompok wanita ini diperoleh melalui Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) 522/119/BKPH-AP/XII/2020 dan 02/KWTH-BS/XII/2020 pada tanggal 4 Desember 2020. Usaha utama dari kelompok

ini adalah pengumpulan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dari jenis Gadung. Jarak kelompok ini menuju Ibukota Provinsi adalah 297 km, ke Ibukota Kabupaten Sumbawa sejauh 110 km, sementara ke Kecamatan Tarano hanya 10 km. Kelompok ini resmi didirikan pada 13 November 2020 oleh Kepala Desa Banda dan dipimpin oleh Ibu Sunardiati. Terdapat 17 anggota dalam kelompok ini, semuanya perempuan.

Faktor Penyebab Terjadinya Perambahan Hutan

Tabel 1. Data Lahan Perambahan Hutan pada Balai KPH Ampang Plampang, 2024

FID	Nama Lokasi	KPH	Luas	Jenis Penggunaan Lahan	Koordinat	
					X	Y
0	bakoromo	Wilayah BKPH Amplang	58,831403	Pertanian Lahan Kering	625864	9042338
1	pidang	Wilayah BKPH Amplang	401,265134	Pertanian Lahan Kering	620053	9041814
2	kunil-banda	Wilayah BKPH Amplang	530,908463	Pertanian Lahan Kering	615898	9039225
3	banda_ongko	Wilayah BKPH Amplang	358,162049	Pertanian Lahan Kering	616857	9036361
4	ongko	Wilayah BKPH Amplang	458,439604	Pertanian Lahan Kering	617434	9033394
5	jotang	Wilayah BKPH Amplang	62,343191	Pertanian Lahan Kering	614973	9029266
6	brangpeniris_peruakputih	Wilayah BKPH Amplang	269,458342	Pertanian Lahan Kering	613623	9025746
7	peruakputih_ale	Wilayah BKPH Amplang	2831,984599	Pertanian Lahan Kering	605366	9025181
8	padak_sp	Wilayah BKPH Amplang	2045,638119	Pertanian Lahan Kering	597742	9030129
9	SP_sukamulya	Wilayah BKPH Amplang	3978,360772	Pertanian Lahan Kering	594328	9021150
10	teluksantong	Wilayah BKPH Amplang	198,450685	Pertanian Lahan Kering	600743	9033990
11	sinarjaya	Wilayah BKPH Amplang	14,736384	Pertanian Lahan Kering	590769	9034368
12	lab.sangoro	Wilayah BKPH Amplang	203,200201	Pertanian Lahan Kering	581911	9048374
13	maja1	Wilayah BKPH Amplang	292,6007	Pertanian Lahan Kering	578140	9052065
14	maja2	Wilayah BKPH Amplang	102,772152	Pertanian Lahan Kering	577857	9047217
15	ngali	Wilayah BKPH Amplang	890,298961	Pertanian Lahan Kering	573358	9049328
16	labangka	Wilayah BKPH Amplang	3646,219447	Pertanian Lahan Kering	574300	9015767
17	sukadamai	Wilayah BKPH Amplang	141,499496	Pertanian Lahan Kering	580903	9019262
18	selante	Wilayah BKPH Amplang	402,553196	Pertanian Lahan Kering	583882	9021181
19	teluksantong	Wilayah BKPH Amplang	88,753379	Tambak	599246	9033301
20	teluk santong	Wilayah BKPH Amplang	746,308051	Pertanian Lahan Kering	596437	9036861
21	nyarinying	Wilayah BKPH Amplang	178,459916	Tambak	605202	9032969
22	Gapit	Wilayah BKPH Amplang	17899,91709	Pertanian Lahan Kering	595367	9029229
Total Luas			35.801,16			

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya perambahan hutan di Desa Banda, yaitu:

1) Faktor sosial dan ekonomi

Kriswoyo (2018) menyatakan bahwa perambahan hutan berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi keluarga. Secara umum, kondisi ekonomi masyarakat desa terutama bergantung pada sumber pendapatan pertanian. Selain itu, keterbatasan lahan yang tersedia bagi setiap keluarga, ditambah dengan meningkatnya permintaan, menyebabkan sebagian masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi melakukan penggundulan hutan dan perluasan lahan untuk keperluan pertanian. Dalam penelitian ini, telah diamati dan dilaporkan bahwa penduduk Desa Banda melakukan penggundulan hutan untuk bercocok tanam, khususnya jagung. Selain itu, masyarakat juga berupaya untuk menambah lahan pertanian untuk meningkatkan pendapatan mereka.

2) Faktor akses terhadap hutan

Priambudi dan Pigawati (2014) menunjukkan bahwa salah satu elemen kunci yang memengaruhi perubahan penggunaan lahan adalah aksesibilitas, yang pada akhirnya memengaruhi jarak dan waktu tempuh ke berbagai lokasi. Desa Banda, yang berdekatan dengan kelompok hutan RTK 70 Ampang Kampaja, menjadi alasan penting mengapa penduduk sering melakukan aktivitas sehari-hari di dekat hutan. Temuan observasi mengungkapkan bahwa jarak dari pemukiman masyarakat ke kawasan hutan berkisar

antara 7 dan 10 kilometer. Kedekatan ini memudahkan akses bagi masyarakat untuk membuka lahan di dalam kawasan hutan. Pembukaan lahan yang diakses dapat menyebabkan perambahan yang didorong oleh praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah memasuki dan memanfaatkan sumber daya hutan yang lebih mudah diakses, yang berpotensi meningkatkan tekanan pada hutan dan lahan secara signifikan.

3) Faktor budaya

Masyarakat yang berada di Desa Banda, dekat Kelompok Hutan Ampang Kampaja RTK 70, sangat tergantung pada sumber daya hutan. Ketergantungan ini telah menjadi tradisi dan budaya yang mendalam di kalangan penduduk setempat. Selain itu, mereka juga cenderung melakukan praktik penyewaan area hutan. Maka dari itu, penting untuk memahami aspek budaya masyarakat terkait penguasaan tanah lokal. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian anggota komunitas menganggap bahwa tanah di dalam kawasan hutan merupakan lahan garapan yang diwariskan secara turun-temurun.

4) Faktor kurangnya pendidikan masyarakat

Keterbatasan pemahaman yang dimiliki masyarakat sering menjadi penghalang. Pendidikan yang dimiliki oleh para penyusup hutan umumnya berada pada level rendah, sehingga membuat anggota masyarakat kesulitan dalam memahami informasi yang mereka terima. Rendahnya tingkat pendidikan ini mengakibatkan praktik pertanian yang mereka jalankan masih bersifat tradisional, diwariskan dari generasi sebelumnya. Kurangnya pendidikan ini berimbas pada masalah seperti kemiskinan di kalangan masyarakat. Tingkat pendidikan yang tidak tinggi ini menghasilkan masyarakat yang cenderung kurang memiliki pengetahuan mengenai masa depan mereka.

5) Faktor keterbatasan personil dalam pengawasan hutan

Hasiholan (2024) mencatat bahwa salah satu alasan utama kehancuran hutan adalah ketidakefektifan pengelolaan perlindungan hutan yang dilakukan oleh lembaga kehutanan. Subarna (2011) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab minimnya pengawasan adalah kurangnya jumlah petugas keamanan hutan yang memadai, sehingga warga masyarakat melakukan kegiatan seperti penebangan liar dan penyerobotan lahan hutan. Di sisi lain, jumlah total pegawai yang bekerja di Balai KPH Ampang Plampang hingga saat ini tercatat sebanyak 17 pegawai ASN dan 39 kontrak petugas keamanan hutan. Sementara itu, yang bertanggung jawab atas area hutan di daerah Banda dan sekitarnya adalah Resor Rai Ampang, yang hanya memiliki 5 anggota staf. Pada setiap individu dihadapkan pada tanggung jawab untuk menjaga keamanan hutan dengan rata-rata area yang harus diawasi mencapai 1.876,51 hektar.

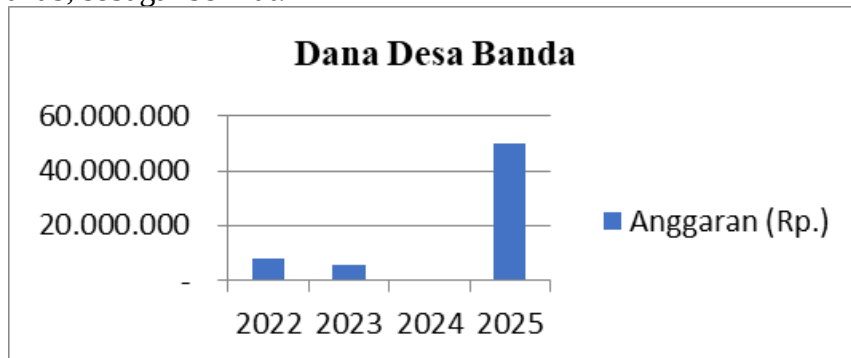
Upaya Penyelesaian Masalah

1) Solusi sosial dan ekonomi

Untuk menghentikan budaya penebangan hutan yang dipicu oleh faktor ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat menjadi inovasi kolaboratif yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Banda bersama Balai KPH Ampang Plampang. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap hutan di daerah hulu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan perekonomian penduduk. Pemerintah Desa Banda telah merumuskan beberapa misi yang telah ditetapkan. Misi ini berlandaskan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 26), dan sejak tahun 2022 hingga sekarang, Pemerintah Desa Banda telah mengalokasikan dana desa untuk memajukan ekonomi masyarakat serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam.

Misi untuk meningkatkan ekonomi dalam sektor sumber daya alam yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Banda dijelaskan oleh Kepala Desa Banda, yaitu

Jumriadi Wahab, sebagai berikut:



Gambar 3.

“Desa Banda saat ini sudah berbenah diri. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah pengembangan Wisata Desa KARAJA (Kelengkeng, Rambutan, dan Jambu), pengelolaan hasil hutan bukan berupa pengolahan jambu mete, gadung, dan kayu putih. Pengembangan Wisata Desa KARAJA saat ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 yang dimulai dengan penanaman Kelengkeng dan pada 4 April 2025 sudah mulai dipanen bersama Bapak H. Johan Rosihan, S.T. (Anggota Komisi IV DPR RI). Pengolahan jambu mete menjadi Kacang Mete Banda dan brownies Asmara (Asal Masyarakat Sejahtera) serta Gadung diolah menjadi keripik gadung telah dikelola oleh KWTH Banda Sejahtera. Sedangkan pengolahan minyak kayu putih baru dilaksanakan uji coba dan akan dibahas pengembangannya pada pertengahan 2025”.

Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak H. Johan Rosihan, S.T. menekankan:

“2022 kita coba mensupport Desa Banda dengan program kampung buah. Warga mulai menanam buah. Tiap pekarangan dimanfaatkan untuk menanam buah. Alhamdulillah 2025 kita kembali untuk memetik buah yang dulu ditanam. Sekarang kalau ke Banda serasa berkunjung ke kebun klengkeng. Luar biasa”.

Rina Hardiana selaku Sekretaris KWTH Banda Sejahtera menjelaskan:



Gambar 4.

“Awal mulanya kami menjual Jambu Mete secara gelondongan dengan harga Rp. 15.000 - 20.000 per kg serta menebang pohon termasuk Jambu Mete, lalu kami tanami dengan jagung. Namun setelah kami mendapatkan pelatihan pengolahan HHBK, kami termotivasi untuk memelihara dan mengembangkan jambu mete serta menanam Gadung. Produk Kacang Mete, Brownies Asmara maupun keripik gadung kami sudah terjual ke beberapa kota, ke lombok bahkan ke Bogor dengan harga lebih bagus Rp. 50.000 per 250 gram serta dijadikan contoh produk dengan keamanan pangan oleh Tim Afoco”.

2) Solusi pada akses terhadap hutan

Fokus pada pemahaman yang ramah lingkungan di area terbuka bertujuan untuk

memaksimalkan pemanfaatan lahan dengan mengintegrasikan tanaman pertanian dan pohon-pohonan, serta meningkatkan keberlanjutan baik dalam aspek lingkungan maupun ekonomi. Ini dapat diimplementasikan melalui beragam sistem agroforestri. Kerjasama ini merupakan hasil kolaborasi antara BKPH Ampang Plampang dan Pemerintah Desa Banda sebagai solusi untuk mengatasi akses ke wilayah hutan yang sudah terbuka, serta mengurangi ketergantungan pada hutan. Dengan cara ini, tujuan untuk menciptakan keberlanjutan hutan dan upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilaksanakan secara efektif.

3) Solusi budaya

Informasi mengenai tindakan kriminal yang mempengaruhi ekosistem hutan dan pemanfaatan pengetahuan lokal adalah pendekatan yang memperhatikan tradisi dan wawasan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, yang dapat memperkuat keberlanjutan serta dukungan komunitas. Proyek ini memerlukan waktu yang cukup lama, serta kolaborasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa Banda dan Balai KPH Ampang Plampang menjadi elemen penting untuk mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat terkait perambahan hutan.

Pak Ayani (Masyarakat Desa Banda) menyampaikan:

“Selama ini kami banyak menyia-nyiakan waktu dengan berfokus pada penanaman jagung, padahal tidak memberikan keuntungan yang lebih baik, dan saat ini kami masyarakat Desa Banda sudah tidak melakukan perambahan hutan lagi dan mulai menanam tanaman produktif seperti Jambu Mete dan tanaman bawah tegakan seperti Gadung”.

4) Solusi kurangnya pendidikan masyarakat



Gambar 5.

Penyuluhan serta sosialisasi adalah aspek vital untuk mengedukasi komunitas tentang signifikansi hutan, peraturan yang ada, dan efek perambahan yang dapat meningkatkan pemahaman serta mengurangi tindakan perambahan hutan. Sasaran dari penyuluhan dan sosialisasi ini adalah untuk memodifikasi perilaku dan kebiasaan masyarakat dari melakukan perambahan hutan guna penanaman monokultur jagung menjadi beralih ke pola agroforestry dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan.

Pak Ayani meneruskan:

“Setelah mendapat pengetahuan tentang agroforestry dan pentingnya menjaga kelestarian hutan, kami sudah tidak melakukan perambahan hutan”.

5) Solusi keterbatasan personil dalam pengawasan hutan

Dengan jumlah personel yang terbatas, BKPH Ampang Plampang perlu meningkatkan pengawasan dengan memperkuat kontrol dan pengawasan di lapangan, termasuk pemanfaatan teknologi seperti drone dan kamera, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah penebangan hutan secara ilegal. Selanjutnya, penerapan sanksi yang tegas akan dilakukan terhadap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh

individu maupun kelompok, sangat penting untuk menimbulkan efek jera. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam mengidentifikasi pelaku penebangan hutan karena mereka selalu menghindari setiap kali personel keamanan datang ke lokasi.

Atas situasi tersebut, Balai KPH Ampang Plampang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Desa Banda untuk menciptakan kolaborasi dalam inisiatif pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan. Bapak Syaifullah, S.Hut., M.Si. yang menjabat sebagai Kepala BKPH Ampang Plampang menekankan:

“Dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, tidak cukup dengan hanya mengandalkan kerja KPH saja. Tetapi KPH itu harus bisa bersinergi dengan para pihak. Salah satunya adalah dengan Pemerintah Desa. Salah satu yang bisa kami berikan contoh di sini adalah BKPH Ampang Plampang telah bersinergi dengan Pemerintah Desa Banda dalam beberapa program: 1) program penyuluhan dan penyadartahuan masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi menjaga dan melindungi hutan dari berbagai gangguan seperti perladangan atau perambahan hutan, illegal logging, maupun kebakaran hutan; 2) bersinergi dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan KWTH Banda Sejahtera dalam pengolahan HHBK mete dan gadung; 3) KPH mendukung penuh program Pemerintah Desa Banda untuk mewujudkan wisata desa KARAJA melalui pembangunan demplot di Desa Banda. Harapannya Desa Banda bisa menjadi contoh bagaimana hutan itu berperan strategi sebagai sumber ketahanan pangan, sumber energi, dan air”.

Dampak Sinergitas KPH dengan Desa

Dampak yang muncul setelah terlaksananya kolaborasi antara BKPH Ampang Plampang dan Pemerintah Desa Banda adalah:

No	Indikator	Kondisi Sebelum dan Sesudah Inovasi	
		Sebelum	Sesudah
1.	Komitmen kerjasama	Sebelum memasuki tahun 2022, Pemerintah Desa Banda bergantung pada dukungan benih dari BKPH Ampang Plampang atau BPDAS Dodokan Moyosari, tanpa berupaya untuk mengalokasikan dana desa bagi pelestarian lingkungan dan penguatan masyarakat.	Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 26), sejak tahun 2022 hingga sekarang, Pemerintah Desa Banda telah menginvestasikan dana desa untuk memajukan ekonomi masyarakat, sekaligus menggali potensi sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan.
2.	Kolaborasi yang berkelanjutan	Pemerintah Desa Banda dan KPH memiliki keterkaitan yang tidak terlalu istimewa.	Tumbuhnya kerjasama yang berkelanjutan antara Pemerintah Desa dan KPH bertujuan untuk menciptakan hasil jangka panjang dalam aspek ekologi, sosial, serta ekonomi.
3.	Pola pikir dan perilaku masyarakat	Mayoritas individu beranggapan secara cepat, melihat jagung sebagai komoditas utama. Dan karena terbatasnya area yang bisa diolah, masyarakat melakukan penebangan hutan untuk	Perubahan tingkah laku masyarakat setelah menerima pendidikan mengenai pentingnya melindungi hutan serta memanfaatkannya dengan bijak dan berkelanjutan dalam sistem <i>agroforestry</i> dapat menghasilkan manfaat yang

		memanfaatkan kayunya serta mempergunakan tanah untuk menanam jagung.	lebih baik.
4.	Mitigasi perubahan iklim dan pengamanan hutan	Langkah-langkah untuk mengurangi dampak perubahan iklim masih berada di ranah individu masyarakat, karena kegiatan menanam pohon dilakukan berdasarkan keinginan masyarakat dan didukung oleh bantuan dari pihak luar.	Usaha pengurangan dampak perubahan iklim telah dimulai di tingkat komunitas, di mana aktivitas penanaman pohon dilakukan atas instruksi dari Pemerintah Desa, keinginan warga setempat, serta didanai oleh Dana Desa, KPH, BPDAS, dan sumber lainnya. Selain itu, masyarakat mulai terlibat aktif dalam kegiatan penanaman RHL dan patroli menjaga hutan secara kolektif.
5.	Wisata Desa KARAJA	Sudah dilaksanakan namun belum optimal	Dijalankan dengan dedikasi tinggi, memiliki anggaran yang jelas, serta melibatkan partisipasi seluruh penduduk desa.
6.	Produktivitas kelompok	Masyarakat dan komunitas menjual jambu mete, gadung, dan berbagai barang lainnya secara gelondongan	Lebih produktif dan HHBK sudah diolah oleh KWTH Banda Sejahtera. Jambu mete diolah menjadi Kacang Mete Banda dan brownies asmara, serta gadung diolah menjadi keripik
7.	Kesejahteraan masyarakat	Harga jual HHBK sangat murah: 1. Jambu Mete dijual seharga Rp. 15.000 - 20.000 per kilogram 2. Gadung mentah harganya Rp. 50.000 per kilogram	Harga jual produk olahan HHBK lebih menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi: 1. Harga Kacang Mete Banda: Rp. 50.000 untuk 250 gram 2. Harga brownies asmara Rp. 60.000 per paket 3. Harga keripik gadung Rp. 10.000 untuk 200 gram
8.	Inovasi baru	Pemerintah Desa Banda, warga dan kelompok belum menciptakan inovasi baru.	Telah dilakukan percobaan distilasi minyak kayu putih dengan menggunakan peralatan yang memiliki kapasitas 20 liter dan akan diperluas pengembangannya pada tahun 2025.

Hambatan dalam memusnahkan budaya perambahan hutan

Faktor-faktor yang menghambat usaha untuk menghilangkan budaya penebangan hutan meliputi: 1) kecenderungan para peladang lebih memilih memiliki tanah untuk menanam tanaman tahunan tanpa adanya vegetasi hutan (monokultur) dibandingkan dengan mengelola hutan menggunakan metode agroforestri; 2) masyarakat lebih fokus

pada peningkatan ekonomi dan ekspansi lahan daripada bersedia berkontribusi dalam melestarikan hutan; 3) anggota komunitas perhutanan sosial masih kurang menyadari pentingnya institusi dan kelompok penggiat lingkungan; 4) kelompok petani juga memandang bahwa mereka bukanlah garda terdepan dalam pelestarian hutan; dan 5) tradisi musyawarah yang mulai hilang di antara masyarakat.

KESIMPULAN

Dari data dan analisis penelitian, terdapat sejumlah kesimpulan mengenai penyebab deforestasi, cara-cara untuk mengatasi permasalahan, serta efek kerjasama antara KPH dan Desa. Penyebab terjadinya deforestasi di Desa Banda yang terletak di Kecamatan Tarano adalah: 1) faktor sosial dan ekonomi; 2) faktor akses terhadap hutan; 3) faktor budaya; 4) faktor kurangnya pendidikan masyarakat; 5) faktor keterbatasan personil dalam pengawasan hutan. Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Faktor yang lebih mendorong terjadinya perambahan hutan yaitu faktor sosial dan ekonomi.

Upaya untuk mengatasi masalah perambahan hutan dilakukan dengan memperhatikan kelima aspek yang telah disebutkan. Untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini, BKPH Ampang Plampang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Banda. Beberapa hasil positif dari kolaborasi ini antara lain: 1) intensitas kerja sama yang semakin solid setelah Dana Desa dialokasikan untuk mendukung fungsi KPH sejak 2022; 2) perubahan cara pikir, perilaku, dan budaya masyarakat yang mulai menjauh dari tradisi merambah hutan; 3) terealisasinya Wisata Desa KARAJA dan peningkatan produktivitas KWTH Banda Sejahtera yang berkontribusi pada pengurangan ketergantungan terhadap hutan di hilir; 4) kesejahteraan warga yang mengalami peningkatan; 5) lahirnya inovasi lain seperti pengembangan minyak kayu putih.

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini adalah: 1) memperkuat komitmen kolaborasi antara KPH dan Desa untuk menciptakan sistem yang terencana dalam rangka mengelola hutan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; 2) pentingnya penambahan anggota pengaman hutan di KPH untuk mengoptimalkan hasil kerja dalam menjaga kelestarian hutan; 3) mendorong kerjasama dari semua pihak untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat dalam mengelola kawasan hutan; 4) legalitas kelompok perlu ditingkatkan; 5) diperlukan program edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan dan hutan untuk kehidupan; 6) desa lain sebaiknya dapat mengadopsi inovasi kolaborasi ini, untuk meningkatkan kualitas lingkungan di daerah mereka masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa. (2024). Kecamatan Tarano Dalam Angka Tahun 2024. Volume 14.
- Balai KPH Ampang Plampang. (2018). Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Unit KPHP Plampang (Unit XIII) Balai KPH Ampang Plampang tahun 2019 s/d 2028.
- Balai KPH Ampang Plampang. (2024). Data Lahan Perambahan Hutan pada Balai KPH Ampang Plampang tahun 2024.
- Balai KPH Ampang Plampang. (2024). Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Unit KPHL Ampang (Unit XIV) Balai KPH Ampang Plampang tahun 2025 s/d 2034.
- Dhaka, Y. R., Leksono, A. S., Suprayitno., D. (2017). Analisis Dan Dampaknya Secara Ekonomi, Ekologi Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perambahan Hutan Di Kawasan Cagar Alam Watu Ata Kecamatan Bajawa. *Konservasi Sumberdaya Hutan Jurnal Ilmu Ilmu Kehutanan*, 1, 51–58.
- Fazriyas., Tamin, R. P., Irawan, D. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Perambahan

- Kawasan Hutan Lindung Gambut (Studi Kasus Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat). *Jurnal Silva Tropika*, 2(2), 6–10.
- Hariato, D., Suhartoyo, H., Barchia, M. F., Anwar, G. (2022). Laju Perubahan Penutupan Lahan dan Faktor-Faktor Yang Mendorong Perambahan Kawasan Hutan Bukit Balai Wilayah Pengelolaan UPTD KPH Wilayah XI Kikim-Pasemah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. *Naturalis: Jurnal*
- Hasiholan, Waldemar .(2024). Manual Perlindungan dan Pengamanan Hutan bagi Satuan Pengamanan Hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Kriswoyo, B. N. (2018). Analisis Pohon konflik TWA Ruteng. Balai Besar Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Kupang. <http://bbksdantt.menlhk.go.id/14-latestnews/156-analisis-pohon-konflik-twa-ruteng>. Diakses pada tanggal 14 September 2024.
- Priambudi, B. N, & B. Pigawati. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan dan Sosial Ekonomidi Sekitar Apartemen Mutiara Garden. *Jurnal Teknik PWK*. 3(4) : 576-584.
- Raharja, I. F. (2018). Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat. *Jurnal Selat*, Volume. 6, 1–18.
- Subarna, T. (2011). Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggarap di lahan hutan lindung studi kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat. *Jurnal penelitian sosial dan ekonomi kehutanan*, 8 (4) : 265-275.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta